

**PERAN PENGHULU DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
KAMPUNG (BUMKam) SEJAHTERA DI KAMPUNG BENTENG HULU
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

Rico Avero¹, Zainal²

^{1,2}Universitas Islam Riau

¹ricoavero@student.uir.ac.id, ²zainal.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dan ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Tipe dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini akan dapat memberikan gambaran bagaimana Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa sebagai garda terdepan bahwa peran Penghulu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) belum berperan karena dapat dilihat dari indikator yang dijalankannya hanya sebagian saja, sebenarnya tugas dan kewajiban sudah dijelaskan dalam peraturan Kampung namun memiliki faktor penghambat adalah minimnya kurangnya pembinaan penghulu selaku komisiaris kepada seluruh pelaksana operasional badan usaha milik kampung ini, dan masih kurangnya peran penghulu dalam pembuat keputusan pembagi sumber dana sehingga mengakibatkan anggaran yang dikelola BUMKam masih kurang.

Keyword : Peran, Pengelolaan dan BUMKam

PENDAHULUAN

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan pada 12 Oktober 1999. Kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan, salah satunya Kecamatan Mempura yang memiliki 7 kampung dan 1 kelurahan. Eksistensi desa sebagai self governing community mendahului eksistensi negara, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015, terjadi perubahan penamaan dari desa menjadi kampung dan kepala desa menjadi penghulu kampung, dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Untuk menggerakkan perekonomian di kampung yang memiliki semangat kolektif dan gotong royong, kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). BUMKam dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Pendirian BUMKam dapat dilakukan untuk satu kampung atau antar kampung. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga tetap dipertahankan karena terbukti bermanfaat bagi masyarakat desa. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dibuka peluangnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Benteng Hulu dimaksudkan untuk menampung berbagai kegiatan perekonomian di kampung, baik yang berkembang secara adat dan budaya maupun yang diserahkan oleh pemerintah. Prinsip dasar pendirian BUMKam adalah pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi. BUMKam dapat didirikan atas inisiatif pemerintah kampung dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah, dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi masyarakat serta kekayaan kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha kampung.²

Dalam Peraturan Kampung Benteng Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung Sejahtera menyebutkan dalam Bab II pasal 3 dan 4 dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi pendirian BUMKamp Sejahtera di Kampung Benteng Hulu yaitu pertama terbentuknya usaha dalam perekonomian kampung yang bersifat mandiri dan berdaulat, kedua untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kampung Benteng Hulu, ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung.³

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah usaha yang dimiliki dan

¹ Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS.

² Sawir, M., Fatimah, S., Kala'Padang, Y., Kamaluddin, S., Susilawaty, S., Abubakar, F., ... & Anirwan, A. (2023). Sosialisasi Inovatif Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Dosay Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 37-46.

³ Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).

dikelola oleh pemerintah kampung dan masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kampung. BUMKam bertujuan mengoptimalkan aset desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, menjalin kerja sama usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa.⁴ Pendirian dan pengelolaan BUMKam merupakan wujud pengelolaan ekonomi produktif desa secara kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BUMKam perlu dikelola secara profesional dan mandiri, dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi. Saat ini, BUMKam Sejahtera termasuk kategori BUMKam yang berkembang. Berdasarkan hasil Musyawarah Kampung telah ditetapkan kepengurusan BUMKamp Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung

NO	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Sadam, S.Si,NL.P	S1	Penasihat
2	Kantong Riyadi	S1	Pengawas
3	Wibowo Nugroho	S1	Direktur
4	Ike Supriyatin	SMK	Bendahara
5	Widia Ulfa	S1	Sekretariss
6	Widia Ulfa	S1	Kepala Unit Keuangan Mikro
7	Ike Supriyatin	SMK	Kepala Unit Dagang
8	Wibowo Nugroho	S1	Kepala Unit Peternakan

Sumber: Modifkasi Penulis, 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera terdiri dari 8 orang, termasuk penghulu kampung sebagai komisaris atau tim penasihat. Masing-masing pengurus telah dibagi sesuai jabatannya, namun untuk posisi kepala unit dagang dan kepala unit peternakan saat ini dirangkap oleh direktur dan bendahara karena adanya kekosongan pengurus. Sebelumnya, posisi-posisi tersebut telah habis masa kontraknya, sehingga BUMKam Sejahtera sementara waktu mengisi kekosongan tersebut. Masyarakat Kampung Benteng Hulu berharap agar masing-masing pengurus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan dapat mengelola BUMKam sesuai dengan visi dan misinya.

Peran penghulu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dapat dilihat dalam Peraturan Kampung Benteng Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang

⁴ Poniasih, N. K. (2021). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Pendirian Badan Usaha Milik Kampung Sejahtera dalam bab VIII bahwa hak dan kewajiban penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas internal.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat, letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa yang berguna untuk menentukan arah pembangunan desa kedepannya dan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu dalam bentuk pembangunan di kampung Benteng Hulu yaitu penguatan ekonomi di kampung melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). BUMKam ini merupakan kelembagaan yang ada di Kampung Benteng Hulu yang dibentuk untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki oleh kampung untuk membangun kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Benteng Hulu.⁶

Modal awal BUMKam bersumber dari APBKam. Kekayaan BUMKam merupakan kekayaan kampung yang telah dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMKam Sejahtera ini bersumber dari penyertaan modal kampung maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi dan penyertaan pada masyarakat Kampung. Dapat dilihat dibawah ini sumber keuangan badan usaha milik kampung sejahtera sebagai berikut :

Tabel 2. Sumber Anggaran Badan Usaha Milik Kampung

NO	Tahun	Sumber Anggaran	Modal
1	2019	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan	Rp.253.900.000
2	2020	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp.66.114.500
3	2021	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp.25.000.000
4	2022	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Penyertaan Modal Dana Kampung	Rp.163.000.000
5	2023	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp.40.000.000
6	2024	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp. 33.000.000

Sumber : Modifikasi Penulis, 2024

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui sumber anggaran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera dalam beberapa tahun

⁵ Poniasih, N. K. (2021). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

⁶ Wardana, M. A., Lestari, D., Wijaya, N. S., Parwati, K. S. M., & Nirmala, B. W. (2022). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa Tegal Harum dan Pengelola BUMDes. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(2), 92-98.

terakhir. Pada tahun 2019, anggaran diperuntukkan untuk usaha sarana produksi dan warung serba ada (waserda). Kemudian pada tahun 2020, anggaran digunakan untuk jenis usaha sarana produksi. Selanjutnya, pada tahun 2021 anggaran dimanfaatkan untuk usaha bank sampah. Pada tahun 2022, sumber anggaran berasal dari penyertaan Dana Kampung sebesar Rp 105.000.000 yang digunakan untuk usaha peternakan sapi, selain itu juga digunakan untuk sarana produksi. Untuk tahun 2023 dan 2024, sumber anggaran BUMKam Sejahtera berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi yang digunakan untuk membangun ruko sebagai fasilitas penunjang usaha sarana produksi. Menariknya, pada tahun 2024 seluruh anggaran BUMKam Sejahtera bersumber dari dana BKK Provinsi, tidak lagi menggunakan Dana Kampung.⁷

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) memiliki beberapa jenis usaha yang wajib dikelola, yaitu di bidang jasa, penyaluran sembako, hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga. Namun, bidang usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Pendirian dan pengelolaan BUMKam bertujuan untuk dikelola dan dikembangkan secara mandiri sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, menjadi sumber dana pembangunan desa, mampu mensubsidi kebutuhan pembangunan dan pengembangan pedesaan, mengangkat kehidupan masyarakat miskin, serta menyediakan dana modal bergulir sesuai peraturan desa. Pemerintah Desa Benteng Hulu menjalankan program-program pemanfaatan BUMKam untuk membantu perekonomian masyarakat di sektor pertanian, keuangan, dan peternakan.⁸ Dapat dilihat tabel dibawah ini usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu seperti :

Tabel 3. Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Kampung

NO	Jenis-Jenis Usaha Badan Usaha Milik Kampung Sejahtera
1	UEK-SP (Simpan Pinjam)
2	Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)
3	Penggemukkan Sapi

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

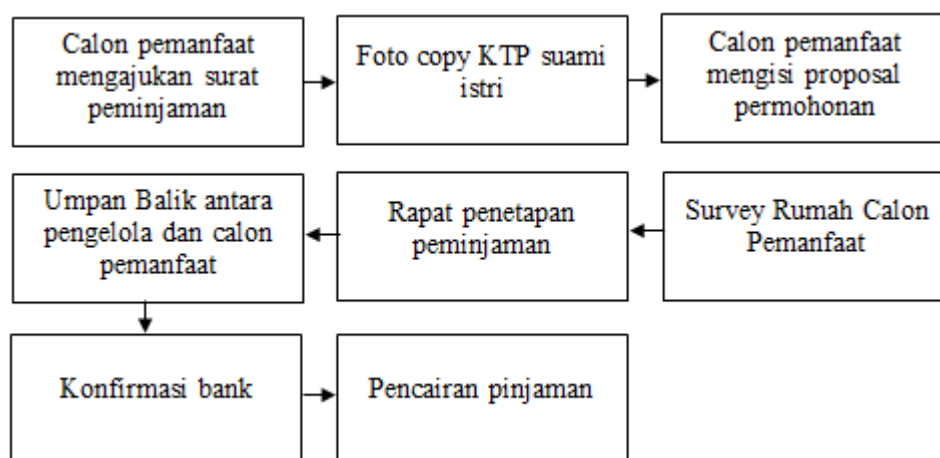
Bisa dilihat Pada tabel di atas pada saat ini BUMKam kampung benteng hulu

⁷ Nasrullah, J (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

⁸ Wulandari S, L. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Kerugian Unit Usaha Di Kabupaten Jayapura* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

terdapat tiga jenis usaha yang sedang berjalan yang mana usaha tersebut gunanya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu ada jenis usaha simpan pinjam yang mana masyarakat yang mempunyai usaha dapat meminjam modal usahanya ke Badan Usaha Milik Kampung tersebut. Tidak hanya itu ada juga jenis usaha Sarana Produksi pertanian merupakan usaha yang menjual bahan yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman pada waktu dan tempat yang tertentu, seperti menjual bibit, pupuk, pestisida, angkong yang semua mengarah kepada sektor pertanian dan perkebunan serta usaha yang ketiga ada jenis usaha penggemukkan sapi dengan sistem pemberdayaan masyarakat, yang mana sapi dari pihak Bumkam dan masyarakat yang mengelola sapi tersebut untuk penggemukan dan apabila terjual maka akan ada sistem bagi hasil antara masyarakat dengan badan usaha milik kampung.

Dalam upaya untuk menekan risiko yang mungkin akan timbul maka calon pemanfaat diharuskan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh direktur BUMKam. Berikut ini adalah mekanisme untuk Unit Simpan Pinjam (USP) Sejahtera Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak yang harus diikuti oleh calon pemanfaat sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Simpan Pinjam

Proses pengajuan pinjaman di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Benteng Hulu melibatkan beberapa tahapan. Calon pemanfaat terlebih dahulu mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Namun, sebelum pencairan dana, akan diadakan rapat internal yang melibatkan penasihat, pelaksana operasional, dan Badan Permusyawaratan Kampung. Rapat ini bertujuan untuk menentukan jumlah pinjaman

yang sesuai dengan kebutuhan calon peminjam. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian dikomunikasikan kembali kepada calon peminjam. Misalnya, jika dana yang dapat dicairkan hanya setengah dari yang diajukan, maka calon peminjam diminta untuk menyetujui jumlah tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari calon peminjam, barulah dilakukan proses pencairan pinjaman. Khusus untuk pinjaman modal usaha, BUMKam Benteng Hulu tidak menetapkan nominal pinjaman tertentu. Namun, mereka menetapkan limit pinjaman maksimal sebesar Rp 25.000.000 dengan tenor maksimal 18 bulan. Dengan adanya batasan ini, diharapkan penyaluran dana pinjaman dapat lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹

Peminjam yang menggunakan jasa simpan pinjam di badan usaha milik kampung sejahtera ini dapat membayar angsurannya bisa melalui tunai atau dengan bayar secara langsung di kantor dan juga bisa melalui metode transfer. Untuk pada saat ini badan usaha milik kampung sejahtera tidak ada masyarakat yang menyimpan uangnya di Bumkam tetapi semua peminjam hanya menggunakan jasa simpan saja di badan usaha milik kampung sejahtera.¹⁰

Berikut ini merupakan daftar pengguna jasa simpan pinjam yang dilaksanakan oleh BUMKam Sejahtera dalam 3 tahun terhitung pada tahun (2021-2023) berdasarkan hasil survey penelitian di BUMKam Sejahtera.

Tabel 4. Daftar Pengguna Jasa BUMKam Pada Tahun 2021

NO	Jumlah Peminjam	593 Orang
1	Laki-Laki	436 Orang
2	Perempuan	157 Orang
3	Peminjaman Lunas	436 Orang
4	Peminjaman Belum Lunas	157 Orang
5	Jumlah Penunggak	46 Orang

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Tabel 5. Daftar Pengguna Jasa BUMKam Pada Tahun 2022

NO	Jumlah Peminjam	630 Orang
1	Laki-Laki	451 Orang
2	Perempuan	179 Orang
3	Peminjaman Lunas	440 Orang
4	Peminjaman Belum Lunas	190 Orang
5	Jumlah Penunggak	46 Orang

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

⁹ Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

¹⁰ Ansari, H. (2023). *Analisis Peran Pembiayaan Kur Dalam Pengembangan UMKM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kutacane)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Tabel 6. Daftar Pengguna Jasa BUMKam Pada Tahun 2023

NO	Jumlah Peminjam	640 Orang
1	Laki-Laki	458 Orang
2	Perempuan	182 Orang
3	Peminjaman Lunas	508 Orang
4	Peminjaman Belum Lunas	132 Orang
5	Jumlah Penunggak	118 Orang

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Benteng Hulu masih menghadapi tantangan terkait tunggakan pembayaran angsuran pinjaman oleh para pemanfaat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dari penghulu selaku tim penasihat BUMKam terhadap direktur BUMKam. Banyaknya tunggakan telah menyebabkan terhambatnya kegiatan simpan pinjam, yang kemudian berdampak pada calon pemanfaat yang akan mengajukan pinjaman selanjutnya.

Tunggakan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil serta terbatasnya dana untuk kegiatan simpan pinjam di BUMKam. Meskipun sudah terdapat perjanjian dan sanksi untuk keterlambatan angsuran, masih ada pemanfaat yang menunggak. Pihak pengelola Unit Simpan Pinjam (USP) BUMKam memberikan kelonggaran beberapa bulan sebelum memanggil pemanfaat yang menunggak untuk mencari solusi pelunasan. Untuk pemanfaat yang terlambat, tidak dikenakan denda, tetapi dilakukan pendekatan persuasif. Sementara itu, bunga pinjaman di USP BUMKam ditetapkan sebesar 1,5%.

Dalam menjalankan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) pemanfaat dapat meminjam kepada Badan Usaha Milik Kampung Sejahtera karena BUMKam membuka untuk kepada calon pemanfaat untuk meminjam dana untuk memulai membuka usaha ataupun untuk mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Benteng Hulu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam Berdasarkan Jenis Usaha di BUMKam Sejahtera Kampung Benteng Hulu Tahun 2021

NO	Jenis Usaha	Individu
1	Perdagangan	222
2	Perkebunan	323
3	Perikanan	5
4	Peternakan	1
5	Industri Kecil	3

6	Jasa	59
---	------	----

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Tabel 8. Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam Berdasarkan Jenis Usaha di BUMKam Sejahtera Kampung Benteng Hulu Tahun 2022

NO	Jenis Usaha	Individu
1	Perdagangan	226
2	Perkebunan	332
3	Perikanan	5
4	Peternakan	1
5	Industri Kecil	3
6	Jasa	62

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Tabel 9. Jumlah Pemanfaat Simpan Pinjam Berdasarkan Jenis Usaha di BUMKam Sejahtera Kampung Benteng Hulu Tahun 2023

NO	Jenis Usaha	Individu
1	Perdagangan	232
2	Perkebunan	336
3	Perikanan	5
4	Peternakan	1
5	Industri Kecil	3
6	Jasa	62

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Hasil usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik kampung sejahtera merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.¹¹ Pembagian hasil usaha milik kampung ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bum Kampung. Alokasi pada pembagian hasil usaha yang dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana, kepailitan atau kerugian yang di alami oleh badan usaha milik kampung sejahtera di kampung benteng hulu akan menjadi beban badan usaha milik kampung sendiri.¹² Dalam hal ini badan usaha milik Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya akan dinyatakan rugi melalui musyawarah kampung. Untuk laba Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

¹¹ Hasan, Amin & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Universitass Riau.

¹² Khasanah, N. R. (2021). Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 36-44.

Tabel 10. Laba Badan Usaha Milik Kampung Tahun 2020-2023

NO	Tahun	Laba BUMKam
1	2020	Rp.11.530.000
2	2021	Rp.12.390.000
3	2022	Rp.7.945.000
4	2023	Rp.8.566.000
Jumlah		RP.40.431.000

Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

Peran badan usaha milik kampung adalah selain untuk memperkuat PAKamp, juga untuk upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung benteng hulu yang dapat di tempuh dengan sejumlah cara, salah satunya adalah dengan cara membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dana untuk membuka usaha atau juga untuk mengembangkan usahanya.¹³ Melihat Kondisi BUMKam Sejahtera pada saat ini sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat tampaknya masih jauh untuk tercapai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka ditemukan beberapa gejala atau fenomena yaitu:

- 1) Masih tingginya jumlah penunggak yang ada di Badan Usaha Millik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu.
- 2) Kurangnya pembinaan penghulu selaku tim penasihat kepada pelaksana operasional BUMKam.
- 3) Kurangnya ketegasan dari BUMKam mengenai masyarakat yang menunggak membayar kredit simpan pinjam yang telah diberikan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti proposal skripsi penelitian dengan judul Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang berarti penelitian eksplorasi yang menggunakan dalam pemahaman variabel.¹⁴ Sesuai dengan fenomena yang di temukan dalam penelitian, maka penelitian ini akan

¹³ Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187-195.

¹⁴ Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.

dilakukan di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini Key Informan dan beserta informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Setelah melakukan penelitian dengan judul Peran Penghulu Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Sejahtera Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, maka di dapat data dari responden yang berupa alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah melakukan wawancara dan observasi ke lokasi penelitian maka di dapat hasil penelitian yang akan dijelaskan satu per satu indikator dapat dilihat di bawah ini :

1. Peran Antar Pribadi

Peran antar pribadi ini yang berkaitan dengan peran pemimpin dilakukan untuk mewakili organisasi yang di pimpinnya atau sebagai garda terdepan di dalam organisasinya yang mana di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal, memberikan peran interpersonal dengan yang dipimpin seperti menjalankan

¹⁵ Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

fungsi-fungsi pokoknya seperti melakukan motivasi, melakukan interaksi dengan orang yang berada di organisasinya maupun orang lain yang berada di dalam organisasinya.¹⁶

- a. Sebagai Tokoh Terdepan Dalam Organisasi. Sebagai tokoh terdepan di dalam organisasi dimaksud seperti Penghulu diminta untuk menjadi tokoh terdepan dalam organisasi yang dipimpinnya dalam permasalahan yang bersifat formal. Dapat disimpulkan bahwa penghulu cukup aktif berinteraksi dengan pelaksana operasional BUMKam, namun menilai kondisi BUMKam saat ini belum memuaskan. Penghulu memprediksi kendala pada perputaran uang yang masih kecil. Untuk itu, penghulu berupaya mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guna memperbaiki jalannya BUMKam. Berdasarkan observasi, penulis menyimpulkan bahwa penghulu memiliki niat untuk meningkatkan kinerja organisasi BUMKam agar dapat lebih membantu masyarakat kampung. Namun, kondisi anggaran BUMKam saat ini masih terbatas.

2. Peran Yang Berhubungan Dengan Informasi

Peran ini meletakkan penghulu sebagai posisi yang unik yaitu sebagai mendapatkan informasi. Hubungan-hubungan ke luar membawa padanya untuk mendapatkan informasi yang spesial dari lingkungan luarnya sehingga penghulu diletakkan sebagai pusat informasi bagi organisasi yang dipimpinnya.¹⁷

- a. Sebagai penerima dan Pengumpul Informasi. Sebagai pemimpin, penghulu memiliki peran aktif sebagai penerima dan pengumpul informasi dari dalam maupun luar organisasi BUMKam. Informasi yang dikumpulkan tersebut bertujuan agar penghulu dapat mengembangkan organisasi secara optimal. Melalui upaya mencari informasi, penghulu dapat mendeteksi perubahan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi BUMKam, seperti perputaran uang yang masih terhambat. Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penghulu secara proaktif mencari informasi dari luar organisasi, termasuk dari BUMKam lain yang dinilai berhasil. Informasi yang diperoleh kemudian disampaikan kepada pelaksana operasional BUMKam, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan

¹⁶ Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.

¹⁷ La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).

inovasi.¹⁸

- b. Menangani Transmisi Informasi-Informasi ke Organisasinya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penghulu memiliki peran aktif dalam menangani transmisi informasi di organisasi BUMKam. Sebagai pemimpin, penghulu menyampaikan informasi dari luar ke dalam organisasi, serta mengalirkan informasi dari bawahan ke pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa fakta maupun nilai-nilai. Penghulu terlihat proaktif dalam mencari inovasi yang dilakukan BUMKam lain, lalu menyampaikannya kepada pelaksana operasional dan pengawas dalam pertemuan rutin. Hal ini menunjukkan upaya penghulu untuk mengadopsi praktik terbaik guna meningkatkan kinerja BUMKam. Selain itu, penghulu juga mendukung program kerjasama antar kampung untuk mengadakan pelatihan demi menghasilkan program baru bagi BUMKam. Melalui inisiatif ini, penghulu berupaya meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengembangkan inovasi dan memajukan usaha BUMKam. Secara keseluruhan, penghulu tampak proaktif dalam mengupayakan kemajuan BUMKam melalui transmisi informasi dari luar dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia pengelola.¹⁹
- c. Sebagai Juru Bicara. Sebagai juru bicara organisasi, penghulu memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi ke luar maupun menerima informasi dari dalam organisasi BUMKam. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu aktif menyampaikan informasi terkait keterbatasan layanan simpan pinjam BUMKam kepada masyarakat. Meskipun demikian, penghulu juga berupaya untuk terus mencari tahu kebutuhan masyarakat agar BUMKam dapat memberikan layanan yang sesuai. Selain itu, penghulu juga menerima masukan dari bawahannya mengenai kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memahami permasalahan dan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran. Meskipun menghadapi kendala, penghulu tetap berusaha menyampaikan informasi secara transparan dan mencari solusi agar layanan BUMKam dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.²⁰

3. Peran Membuat Keputusan

Peran membuat keputusan ini maksudnya adalah membuat penghulu harus terlibat secara langsung dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasinya

¹⁸ Soetjipto, N. (2015). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*.

¹⁹ Muiz, M, R. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. Depok: Rajawali Pers.

²⁰ Thoah, M (2020). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

untuk sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasinya yang dibuat secara signifikan dan berhubungan.²¹

- a. Peran Sebagai Pengusaha. Dalam peran ini penghulu bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak usaha-usaha yang terkendali dalam organisasi. Peran ini dimulai pada melihat aktivitas-aktivitas dan memahami persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap ke dalam organisasinya. Sebagai bagian dari peran monitor dengan cara melihat dan memahami secara teliti sehingga pemimpin menggunakan banyak waktunya untuk mencari beberapa kesempatan dan situasi yang barangkali dapat dipertimbangkan sebagai masalah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penghulu berperan aktif dalam mencari informasi untuk meningkatkan kinerja BUMKam yang dikelolanya. Penghulu berusaha mencari referensi dari BUMKam lain untuk dapat dijadikan acuan dalam menjalankan dan mengembangkan BUMKam-nya. Hal ini menunjukkan upaya penghulu untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik guna menghindari permasalahan dan mendorong kemajuan BUMKam. Penghulu tampak proaktif dalam mengupayakan kemajuan BUMKam melalui transmisi informasi dari luar organisasi.
- b. Sebagai Pembagi Sumber Dana. Sebagai komisiaris BUMKam, penghulu memiliki peran penting sebagai pembagi sumber dana. Penghulu bertanggung jawab untuk menentukan alokasi dan distribusi sumber dana yang akan disalurkan ke BUMKam. Strategi yang tepat harus ditetapkan, dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan yang bersifat positif dan berjangka panjang. Berdasarkan wawancara, saat ini sumber dana BUMKam berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi, sedangkan dana dari penyertaan kampung belum ada. Kondisi ini menyebabkan usaha-usaha yang dikelola BUMKam masih terkendala anggaran, sehingga perkembangannya terbatas. Meskipun demikian, penghulu ingin menyuntikkan dana dari kampung untuk mengembangkan BUMKam, namun masih khawatir akan mendapat penolakan dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Upaya ini penting dilakukan, mengingat kontribusi BUMKam terhadap Pendapatan Asli Kampung telah meningkat signifikan dari tahun 2022 ke 2023.
- c. Sebagai Negoisasi. Sebagai pemimpin BUMKam, penghulu berperan aktif dalam proses negosiasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Penghulu

²¹ Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.

dituntut untuk menyusun strategi yang menguntungkan bagi kepentingan BUMKam dalam setiap proses negosiasi. Berdasarkan hasil wawancara, penghulu telah melakukan negosiasi dengan pelaksana operasional BUMKam dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Negosiasi ini menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan usaha penggemukan sapi, yang diinisiasi oleh penghulu setelah melihat potensi dan peluang di Kampung Benteng Hulu. Observasi penulis juga menunjukkan bahwa penghulu secara aktif melakukan negosiasi, baik dengan pihak internal BUMKam maupun eksternal. Hasil negosiasi tersebut menghasilkan skema bagi hasil yang menguntungkan, di mana BUMKam mendapat 40% dari hasil penjualan sapi, sementara masyarakat pengelola mendapat 60%. Hal ini menunjukkan kemampuan negosiasi penghulu dalam memastikan kesepakatan yang menguntungkan bagi BUMKam.²²

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera Di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

Kendala adalah sebuah rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan.²³ Kendala ini bisa menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya proses kinerja penghulu selaku komisiaris dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahtera di Kampung Benteng Hulu disebabkan seperti :

1. Masih rendahnya sumber daya manusia, pengetahuan dan Tugas pokok dan fungsi diperjelas lagi setiap pelaksana operasional terhadap jalannya Bumkam ini sehingga belum maksimalnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Kampung.
2. Kurangnya partisipasi penghulu kepada masyarakat terutama yang menunggak dalam usaha simpan pinjam ini yang mengakibatkan banyak dana yang macet.
3. Minimnya penghulu dalam memberikan informasi secara langsung kepada seluruh pelaksana operasional badan usaha milik kampung ini.
4. Penghulu masih kurang dalam pelaksanaan perannya selaku pembagi sumber dana yang berasal dari Dana Kampung (DK) sehingga pada saat ini masih kurangnya anggaran di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

²² Dunggio, S. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15-24.

²³ Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penghulu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Sejahter di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sudah menjalankan perannya tetapi masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada indikator peran antar pribadi penghulu sudah melaksanakan tugasnya namun disamping itu penghulu hanya menyampaikan informasi kepada direkturnya saja dan nanti direkturnya menyampaikan kepada pelaksana operasional lain sehingga memakan waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah informasi yang penting bagi pelaksana operasional lainnya.

Pada indikator pembagi sumber dana penghulu hanya menyalurkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (BKK) saja tidak ada penambahan modal yang berasal dari dana kampung lagi sehingga unit-unit usaha yang dikelola BUMKam saat ini kekurangan anggaran mulai dari usaha Unit Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP) masih banyak masyarakat yang belum bisa meminjam uang ke badan usaha milik kampung karena perputaran uang yang macet-macet sehingga sangat berdampak pada pemanfaat selanjutnya, dan pada usaha sarana produksi akan dibangunnya kios yang untuk disewakan kepada masyarakat yang akan dibangun dengan tempat wisata, dan untuk usaha penggemukkan sapi juga masih kekurangan anggaran dikarenakan direktur badan usaha milik kampung ini ingin menambah jumlah sapi kembali karena dianggap mempunyai benefit yang besar antara badan usaha milik kampung dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, H. (2023). *Analisis Peran Pembiayaan Kur Dalam Pengembangan UMKM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kutacane)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Dunggio, S. (2020). Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 15-24.
- Hasan, Amin & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Universitass Riau.

- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Khasanah, N. R. (2021). Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 36-44.
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187-195.
- Muiz, M, R. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasrullah, J (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Poniasih, N. K. (2021). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Poniasih, N. K. (2021). *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Studi Di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sawir, M., Fatimah, S., Kala'Padang, Y., Kamaluddin, S., Susilawaty, S., Abubakar, F., ... & Anirwan, A. (2023). Sosialisasi Inovatif Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Dosay Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 37-46.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetjipto, N. (2015). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa.
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139-148.
- Thoha, M (2020). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Wardana, M. A., Lestari, D., Wijaya, N. S., Parwati, K. S. M., & Nirmala, B. W. (2022). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa Tegal Harum dan Pengelola BUMDes. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(2), 92-98.
- Wulandari S, L. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kampung Terhadap Kerugian Unit Usaha Di Kabupaten Jayapura* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS.